

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Banjir dari dahulu hingga sekarang masih menjadi permasalahan serius bagi Kota Semarang. Permasalahan banjir yang terjadi dalam kurun waktu  $\pm$  25 tahun terakhir inilah yang kemudian selalu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasinya. Jenis banjir yang sering menggenangi Kota Semarang adalah rob. Banjir rob merupakan banjir yang terjadi akibat perluapan air laut atau air sungai (Jannah, 2018). Sarbi (2002) mengatakan bahwa Kota Semarang memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang  $\pm$  13,6 KM. Rob ini disebabkan oleh adanya pengembangan di wilayah pesisir dengan cara mereklamasi pantai dan pengambilan air tanah secara berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan tanah setiap tahunnya di wilayah utara Kota Semarang yang menyebabkan air laut menjadi naik ke daratan. Hal ini selaras dengan topografi pesisir Kota Semarang yang landau dengan sebagian besar wilayahnya hampir sama tingginya dengan permukaan laut.<sup>1</sup>

Salah satu daerah di Kota Semarang yang rentan terkena rob adalah Tambakrejo. Tambakrejo sebagai salah satu daerah yang mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan dan pemilik tambak menjadikan daerah ini dijuluki Kampung Nelayan. Kampung Nelayan Tambakrejo ini terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Permukiman Tambakrejo muncul sejak

---

<sup>1</sup> Ramadhany., dkk, “Daerah Rawa Genangan Rob di Wilayah Semarang”, *Jurnal Ilmu Kelautan*, Vol. 1 No. 2, (2012) 174 – 180.

tahun 1989 dengan 20 kepala keluarga yang kemudian sekitar tahun 1990-an bertambah menjadi 50 kepala keluarga. Pada tahun 1990-an tersebut, penduduk sudah mulai mendapatkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran dengan alamat RT 05 RW 16 Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara. Wilayah Ini kemudian semakin berkembang dengan dibangun berbagai fasilitas umum seperti mushola, jalan, jembatan, dan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ), serta pada tahun 2000-an hingga pada tahun 2018, sudah terdapat  $\pm$  160 kepala keluarga yang bermukim di Tambakrejo.

Secara geografis, letak perkampungan Tambakrejo dapat dikatakan kurang strategis dan dikelilingi perairan. Perumahan warga dibuat dengan posisi dua deret yang ditengahnya terdapat jalan perkampungan kecil. Pada sisi timur, Tambakrejo berbatasan langsung dengan Banjir Kanal Timur dan Sungai Banger, di sisi barat berbatasan dengan Sungai Mati, dan sisi utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Posisi ini membuat Tambakrejo menjadi salah satu daerah di Tanjung Mas yang sulit dijangkau dari jalan utama, sering mengalami banjir rob, dan lingkungannya kumuh. Dengan keadaan tersebut, selama ini masyarakat Tambakrejo telah melakukan berbagai upaya untuk bertahan hidup di posisi tempat tinggal mereka yang kurang strategis itu, salah satunya dengan meninggikan bangunan agar luapan air laut tidak masuk ke rumah mereka.

Dalam menyikapi persoalan banjir rob terutama di wilayah Semarang Utara, Pemerintah Kota Semarang terus berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pembangunan. Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan program Normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) yang merupakan salah satu bagian dari

kebijakan pengendalian banjir rob di Kota Semarang. Proyek normalisasi BKT sebagai mega proyek ini merupakan proyek dari pemerintah pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)<sup>2</sup> dan didukung oleh Pemerintah Kota Semarang melalui RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai salah satu program pembangunan untuk mengendalikan banjir dan rob. Program ini merupakan program yang dalam pengerjaannya melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kota.

Setiap program belum tentu mampu memuaskan semua orang. Termasuk Proyek Normalisasi Banjir Kanal Timur ini yang dilakukan di wilayah padat penduduk yang ternyata mengalami suatu hambatan dalam implementasinya. Berdasarkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), ternyata program normalisasi banjir kanal timur yang dilaksanakan melalui keputusan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no. 994/KPTS/M/2016 berdampak ke seluruh bangunan dan hunian di sepanjang sungai BKT Kota Semarang yang mana itu merupakan permukiman warga yang sering disebut dengan Kampung Nelayan Tambakrejo. Permukiman yang sudah berdiri sejak tahun 1989 itu ternyata sering dianggap “kampung tidak resmi” karena menduduki tanah yang bukan milik mereka pribadi, melainkan milik negara sebagai aset pemerintah dan belum memiliki RT sendiri sehingga masih menumpang dengan RT kampung sebelah sehingga belum jelas posisinya dan dinilai *illegal*. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat yang tinggal di bantaran sungai

---

<sup>2</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019: Buku III Agenda Pembangunan Wilayah (Jakarta:BAPPENAS, 2015), hlm. 7-50.

terpaksa harus direlokasi sehingga memicu konflik yang menghambat pembangunan.

Karena warga sama sekali tidak memiliki hak atas kepemilikan lahan meskipun sudah mereka tempati selama puluhan tahun ini kemudian menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Semarang dalam proyek ini, terutama kebijakan relokasi rumah penduduk. Oleh karena itu, Pemkot Semarang sangat tegas dalam menjalankan proses relokasi. Namun dalam hal ini, masyarakat menolak jika harus direlokasi oleh pemerintah. Masyarakat yang berdomisili di sepanjang bantaran sungai Banjir Kanal Timur dan terkena relokasi sebagai dampak dari program BKT tersebut berjumlah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Kepala Keluarga.<sup>3</sup> Kebijakan relokasi ini pun dilakukan disamping untuk menangani rob juga menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan dan pengelolaan permukiman kumuh yang telah betahun-tahun bersarang di bantaran sungai.

Gambar 1.1.  
Kampung Nelayan Sebelum Direlokasi



Sumber: LPM Hayam Wuruk, 2018<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Diana Setyorini, *Thesis*: “Rumah Susun Nelayan Tambak Rejo Semarang”, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020), Diterbitkan, hlm. 11.

<sup>4</sup> <https://lpmhayamwuruk.org/2018/03/indepth-keluhan-warga-tambakrejo-dalam.html>, diakses pada Sabtu, 12 November 2022.

Dalam konflik ini, pemerintah akan merelokasi masyarakat di Rusunawa yang tersedia di Kudu dan Trimulyo yang terletak di Kecamatan Genuk dan Rawasari di Kecamatan Tembalang. Namun, warga yang berprofesi sebagai nelayan menolak solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tersebut dan terus memperjuangkan huniannya agar tidak direlokasi karena tempat relokasi yang sangat jauh sekitar 10 kilometer dari laut tempat mereka bekerja.

Konflik ini pun menarik simpati dari berbagai pihak seperti mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terutama untuk membantu masyarakat dalam advokasi dan lobi kepada pemerintah dalam konflik ini. Para warga telah beberapa kali diberikan surat peringatan untuk pindah dari permukiman *illega-lnya* untuk kepentingan proyek normalisasi Banjir Kanal Timur yang bertujuan untuk mengendalikan banjir. Saat terjadi relokasi secara paksa dari pemerintah karena masyarakat tak kunjung berpindah, terjadilah bentrok antar warga dan Satpol PP dalam pengusuran saat itu.

Upaya pemerintah dalam merelokasi masyarakat Tambakrejo terus berlanjut dalam rangka mensukseskan proyek normalisasi Banjir Kanal Timur. Begitu pun masyarakat yang juga tak berhenti memperjuangkan tempat tinggalnya karena merasa telah menempati dan menjadi tempat bertahan hidup selama puluhan tahun di situ. Terjadi proses negosiasi yang panjang yang melibatkan antara warga dan kawan-kawan jaringan yang turut membantu dengan Pemerintah Kota Semarang kala itu. Warga tetap digusur oleh satpol PP dan menempati pengungsian yang dibantu secara sandang, pangan, dan papan oleh mahasiswa maupun lembaga swadaya masyarakat yang turut berempati. Akhirnya setelah melalui proses

panjang, Pemerintah Kota Semarang berencana akan membangun rumah deret untuk 97 KK yang mana itu merupakan tuntutan mereka yang akhirnya dikabulkan.

Gambar 1.2.

Rumah Deret Kampung Nelayan Tambakrejo



Sumber: Radar Semarang, 2021<sup>5</sup>

Rumah deret tersebut berjumlah 97 unit bertipe 24 yang dihuni dengan sistem undian dan dilengkapi bioseptik pengelolaan air kotor, jaringan listrik, dan saluran air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pengundian secara acak tersebut kemudian berdampak pada masyarakat yang pada waktu pertama kali direlokasi perlu beradaptasi dengan lingkungan mereka yang baru dan hingga saat ini terhitung kurang lebih selama dua tahun mereka menempati permukiman baru hasil relokasi pasti telah mengalami perubahan-perubahan dalam aspek sosial maupun politik dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam, peneliti melakukan *preliminary research* atau studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pasca relokasi tersebut dengan melakukan wawancara kepada dua orang warga Rumah Deret Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang. Menurut

---

<sup>5</sup> <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2021/01/26/hendi-minta-warga-tambakrejo-segera-tempati-kampung-nelayan/>, diakses pada Senin, 14 November 2022.

penuturan Marzuki Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau Paguyuban Armada Laut Tambakrejo yang beranggotakan nelayan Tambakrejo (wawancara, 11 November 2022), beliau pasca relokasi mengalami perubahan kehidupan dari berbagai aspek, salah satunya aspek sosial dan politik. Mereka memerlukan adaptasi kembali dengan lingkungannya saat ini dan mereka merasa asumsi masyarakat hingga pemerintah terhadap mereka pun turut berubah yang pada akhirnya mengundang banyak pihak untuk berempati melalui berbagai bantuan yang datang kepada mereka dalam berbagai bentuk. Hal ini menurut Marzuki sangat mempengaruhi sikap politik mereka terutama perihal bantuan yang diberikan pemerintah, setelah sebelum direlokasi sama sekali tidak pernah menerima bantuan akibat di cap sebagai warga dari kampung yang tidak resmi. Hal serupa juga dikatakan oleh Syafiq salah satu warga Kampung Nelayan (wawancara, 11 November 2022), dimana beliau mengatakan bahwa setelah relokasi, banyak perubahan yang beliau dan masyarakat Kampung Nelayan rasakan misalnya dalam hubungan antar sesama masyarakat maupun dengan pemerintah, perubahan sikap, kebiasaan, hingga budaya, hingga beliau menuturkan pasca relokasi ini seperti menjalani kehidupan baru karena banyak hal yang berubah.

Pada dasarnya segala hal yang menjadi keputusan selalu mendatangkan dampak positif maupun negatif, termasuk relokasi masyarakat Kampung Nelayan Tambakrejo ini. Berbagai pihak yang turut andil dalam proses relokasi terutama Pemerintah Kota Semarang sebagai pemangku kebijakan tentu juga akan menjadi pengaruh terkait perubahan sikap politik masyarakat Kampung Nelayan sebagai yang direlokasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sastroamidjojo bahwa sikap

politik dapat dinyatakan sebagai kesiapan bereaksi terhadap suatu objek tertentu yang bersifat politik sebagai hasil dari penghayatan terhadap objek tersebut, dalam hal ini objeknya adalah sikap pemerintah yang menuai perubahan sikap politik dari masyarakat.<sup>6</sup> Merujuk kepada sumber-sumber yang ada, sikap politik masyarakat dapat muncul dan sewaktu-waktu mengalami perubahan tidak hanya dapat disebabkan oleh sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pilkada (pemilihan kepala daerah) saja, akan tetapi dapat juga disebabkan karena peran pemerintah setempat terkait dengan kebijakan maupun program yang direalisasikan untuk kepentingan masyarakat yang akan melahirkan berbagai dinamika politik dalam masyarakat termasuk sikap dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Normalisasi Banjir Kanal Timur dan Relokasi Rumah Penduduk (Studi Tentang Perubahan Sosial dan Politik Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang)".

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perubahan sosial dan politik masyarakat Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang pasca relokasi akibat Proyek Normalisasi Banjir Kanal Timur Semarang?
2. Bagaimana dampak dari perubahan sosial dan politik masyarakat Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang akibat Proyek Normalisasi Banjir Kanal Timur Semarang?

---

<sup>6</sup> Yoga Firdaus, *Thesis*: 'Sikap Politik Tokoh Masyarakat Tionghoa Terhadap Rencana Kebijakan Penetapan Kampung Kapitan Sebagai Cagar Budaya', (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2021), Diterbitkan, hlm. 27.



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam merumuskan suatu tujuan penelitian, penulis berpegang kepada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan perubahan sosial dan politik masyarakat Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang pasca relokasi akibat Proyek Normalisasi Banjir Kanal Timur Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan dampak dari perubahan sosial dan politik masyarakat Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang akibat Proyek Normalisasi Banjir Kanal Timur Semarang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi banyak pihak sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada kalangan akademik khususnya bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan menjadi bahan dasar tinjauan pustaka penelitian yang berkaitan dengan perubahan sosial dan politik dari kebijakan pemerintah pada Program Normalisasi Banjir Kanal Timur Semarang, serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai akses informasi dan refleksi terkait dengan perubahan sosial dan politik masyarakat pasca adanya relokasi agar kedepannya jika terjadi relokasi kembali, masyarakat jauh lebih siap dalam segala aspek.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Semarang sebagai bahan masukan dalam menjalankan kebijakan relokasi dengan penuh tanggung jawab agar nantinya pasca relokasi pemerintah mampu bertindak untuk lebih peduli dan mengupayakan terwujudnya stabilitas sosial setelah direlokasi.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi komunitas-komunitas sosial dan politik sebagai pihak yang kebersamai masyarakat dalam advokasi saat konflik relokasi agar kedepannya aspirasi masyarakat mampu lebih didengar pemerintah agar terberdayakan dan terjamin kehidupannya pasca relokasi.

### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya perbandingan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan untuk menjamin keaslian dan memperkuat penelitian yang selanjutnya

akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga diperlukan oleh penulis sebagai bahan referensi yang dapat mendukung hasil karya ilmiah yang dibuat. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam membuat karya ilmiah yang berjudul "Normalisasi Banjir Kanal Timur dan Relokasi (Studi Tentang Perubahan Sosial dan Politik Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang)", yaitu:

1. Penelitian yang berjudul "Geopark dan Perubahan Sosial: Analisis Perubahan Sosial Dalam Dimensi Struktural (Peran, Kelas Sosial, Lembaga Sosial) Masyarakat Di Kawasan Geopark Ciletuh Jawa Barat" oleh Regina Gistansya, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sosial dalam dimensi struktural; yaitu peran, kelas sosial, dan lembaga sosial di Dusun Tegalcaringin pasca adanya peresmian Geopark oleh UNESCO tersebut dengan menggunakan teori Himes dan Moore mengenai dimensi perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa perubahan sosial dalam aspek peran terdiri dari adanya mata pencaharian baru, dan perubahan status dan peran. Kemudian perubahan dalam aspek kelas sosial adalah adanya perubahan dalam sistem kelas sosial dan perpindahan kelas sosial. Sementara dalam aspek lembaga sosial terdapat perubahan dalam segi kualitas. Adapun dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari adanya perubahan struktural.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Regina Gistansya, dkk., "Geopark dan Perubahan Sosial: Analisis Perubahan Sosial Dalam Dimensi Struktural (Peran, Kelas Sosial, Lembaga Sosial) Masyarakat Di Kawasan Geopark Ciletuh Jawa Barat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 6, No. 1, (2022) 81-93.

2. Penelitian terdahulu yang berjudul “Perubahan Sosial Akibat Kebijakan Relokasi Bandara Adi Sucipto di Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo” oleh Dewi Susilowati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sosial akibat kebijakan relokasi Bandara Adi Sucipto di Desa Palihan, Temon, Kab. Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan perubahan sosial di penelitian ini dikaji menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan evaluasi bebas tujuan yaitu penelitian tidak berfokus pada apakah proyek atau kebijakan berhasil mencapai tujuannya namun lebih pada efek samping yang terjadi atas kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan relokasi bandara belum diimplementasikan pembangunannya dan ketika kebijakan tersebut masih dalam level wacana telah menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat di Desa Palihan. Perubahan tersebut menyentuh aspek perubahan nilai, norma dan kepercayaan yang ditandai oleh terjadinya pro dan kontra dalam masyarakat. Perubahan tersebut ditandai dengan munculnya aktivitas ekonomi baru yaitu pelatihan usaha yang nantinya dipersiapkan masyarakat untuk menghadapi rencana pembangunan bandara.<sup>8</sup>
3. Penelitian terdahulu yang berjudul “Sikap Politik Tokoh Masyarakat Tionghoa Terhadap Rencana Kebijakan Penetapan Kampung Kapitan Sebagai Cagar Budaya” oleh Yoga Firdaus Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sikap politik Tokoh Masyarakat Tionghoa terhadap rencana

kebijakan penetapan Kampung Kapitan sebagai Cagar Budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sikap politik Tokoh Masyarakat Tionghoa harus memiliki sikap yang tegas terhadap rencana kebijakan penetapan Kampung Kapitan sebagai Cagar Budaya.<sup>9</sup>

4. Penelitian terdahulu yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Perbatasan Entikong Kalimantan Barat” oleh Hardi Alunaza, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pandemi covid-19 di perbatasan Entikong Kalimantan Barat terhadap aspek sosial politik masyarakat di daerah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 berdampak terhadap entitas ketergantungan masyarakat, berkurangnya aktivitas ekonomi, dan meningkatnya ancaman keamanan yang disebabkan oleh kebijakan lockdown. Sementara dari sisi politik, pandemi berdampak terhadap penundaan pilkada.<sup>10</sup>

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada tema penelitian yang membahas terkait perubahan aspek kehidupan sosial dan politik masyarakat pasca adanya suatu kebijakan dari pemerintah maupun fenomena dalam

---

<sup>9</sup> Yoga Firdaus, *Thesis*: ‘Sikap Politik Tokoh Masyarakat Tionghoa Terhadap Rencana Kebijakan Penetapan Kampung Kapitan Sebagai Cagar Budaya’, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2021), Diterbitkan, hlm. 1.

<sup>10</sup> Hardi Alunaza, dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Perbatasan Entikong Kalimantan Barat”, *Jurnal Paris Langkis*, Vol. 3, No.1, (2022), 1-12.

kehidupan bermasyarakat, termasuk kebijakan relokasi. Adanya kesamaan topik yang diangkat pada penelitian sebelumnya mengisyaratkan bahwa topik terkait perubahan aspek kehidupan sosial dan politik masyarakat pasca adanya suatu kebijakan maupun fenomena dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang krusial untuk dibahas lebih lanjut. Selain itu, metode penelitiannya pun sama, yaitu kualitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian penulis ada pada pemilihan judul, waktu, sasaran, lokasi penelitian, dan tujuan. Selain itu, teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian pun berbeda, meskipun terdapat penelitian terdahulu poin 1 yang menggunakan teori yang sama dengan penulis dalam memngkaji permasalahan, yaitu teori dimensi perubahan sosial dari Himes dan Moore, pada penelitian terdahulu poin 1 tersebut hanya mengkaji dari salah satu dimensi saja, yaitu dimensi struktural, sedangkan penulis dalam penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan jauh lebih lengkap berdasarkan tiga dimensi perubahan sosial yaitu struktural, kultural, dan interaksional dengan pada objek penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu. Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa penulis tidak melakukan plagiasi dari penelitian terdahulu. Penulis hanya menjadikan penelitian terdahulu sebagai sumber referensi dan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## **1.6. Landasan Teori**

### **1.6.1. Modernisasi dan Perubahan Sosial**

Salah satu jenis teori pembangunan yang berkembang adalah teori modernisasi. Teori ini lahir pada abad ke-20 sekitar tahun 1950 di Amerika

Serikat sebagai respon kaum intelektual terhadap perang dunia yang dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan oleh penganut evolusi. Modernisasi muncul saat dunia memasuki "Perang Dingin" yaitu perang ideologi dan teori antara kapitalisme dan sosialisme yang melibatkan negara-negara komunis dengan Negara Sosialis Uni Soviet Rusia (USSR) sebagai pimpinannya. Sementara itu, gerakan sosialisme Rusia mulai menyebar pengaruh bukan hanya pada Eropa Timur saja, melainkan hingga ke negara-negara yang baru merdeka. Dengan demikian dalam konteks perang dingin tersebut, teori modernisasi terlibat dalam peperangan ideologi dan menjadi penemuan teori yang terpenting dari perjalanan kapitalisme yang panjang dibawah kepemimpinan Amerika Serikat.<sup>11</sup>

Pada dasarnya segala aspek kehidupan (sosial, ekonomi, budaya, politik) dalam masyarakat akan terlibat dalam proses modernisasi, meskipun arah dan kecepatan perubahannya berbeda-beda. Modernisasi dengan kata dasar "modern" berasal dari Bahasa Latin *modernus* yang merupakan gabungan dari kata *modo* (cara) dan *ernus* (periode waktu masa kini).<sup>12</sup> Dari arti tersebut, modernisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan dari tradisional menjadi modern atau ke arah yang lebih maju dan meningkat dalam berbagai aspek kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Wilbert E. Moore yang mengemukakan bahwa

---

<sup>11</sup> Ellya Rosana, "Modernisasi dan perubahan sosial", *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, (2011) 46-62.

<sup>12</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 80.

modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara barat yang stabil.

Teori modernisasi cenderung beorientasi pada analisis individu dan kultural dalam masyarakat sebagai persoalan dalam pembangunan. Terdapat beberapa pemikiran tentang teori modernisasi yang diklasifikasikan dalam dua teori induk yaitu ekonomi dan non-ekonomi. Salah satu tokoh teori modernisasi non-ekonomi adalah Alex Inkeles dan David H. Smith yang membahas tentang modernisasi melalui karyanya yang berjudul "*becoming Modern, Individual Change in Six Developing Countries*" (1974). Pemikiran Inkeles dan Smith menganggap bahwa dalam modernisasi terdapat manusia modern dengan ciri-ciri memiliki keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, aktif menyatakan pendapat dan demokratis tentang lingkungannya sendiri atau diluar dari hal tersebut, memiliki kesanggupan perencanaan dan pengorganisasian, berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, dan percaya bahwa manusia mampu menguasai alam. Selain itu, Inkeles dan David juga menganggap bahwa untuk menjadi modern, manusia harus mampu mengembangkan sarana material yang ada agar menjadi produktif, dan sektor pendidikan menjadi hal terpenting untuk menyokong.

Teori tersebut pada dasarnya menganggap bahwa dalam modernisasi, individu perlu lebih berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan pendapat Lerner (1958) yang menyatakan bahwa modernisasi lebih banyak diartikan sebagai suatu tren unilateral yang bersifat



sekuler dalam mengarahkan manusia dari tradisional menjadi partisipan. Pakar sosiologi juga mendefinisikan modernisasi sebagai persepektif evolusioner mencakup transisi multi linear masyarakat yang sedang berkembang dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.<sup>13</sup>

Perwujudan aspek modernisasi adalah dengan berkembangnya aspek-aspek kehidupan modern, seperti mekanisasi, urbanisasi, media massa yang teratur, peningkatan pendapatan perkapita, dan juga perubahan struktural yang berhubungan dengan lembaga-lembaga sosial, norma-norma, stratifikasi sosial, dan hubungan sosial (Soekanto, 1999). Lauer juga menyebutkan bahwa terdapat ciri-ciri kemodernan yang dapat diterapkan dalam segala bentuk masyarakat, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang terus lanjut, kadar partisipasi rakyat dalam pemerintah yang memadai, terdapat difusi norma-norma sekuler-rasional dalam kebudayaan, peningkatan mobilitas masyarakat, dan transformasi kepribadian individu, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam tatanan sosial yang sesuai dengan tuntutan modernisasi.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengalaman pembangunan di Dunia Ketiga terbukti bahwa adanya modernisasi tanpa didukung oleh perubahan sosial maka tidak akan efektif. Inti dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sehingga ketika terjadi suatu pembangunan, harapannya mampu memberikan perubahan sosial pada masyarakat ke arah yang lebih baik. Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial. Modernisasi

---

<sup>13</sup> Daniel Lerner, *Modernization, Social Aspects*, International Encyclopedia of the Social Science, hlm. 387.

<sup>14</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 82.

menimbulkan perubahan di berbagai bidang nilai, sikap, dan kepribadian, yang mana sebagian besar persoalan ini terhimpun dalam konsep “manusia modern”.<sup>15</sup> Manusia merupakan makhluk dinamis, terus mengalami perubahan-perubahan sosial dalam hidupnya yang disebabkan oleh berbagai hal. Berbicara mengenai studi perubahan sosial, maka akan melibatkan dimensi ruang dan waktu. Dalam dimensi ruang merujuk pada tempat atau wilayah termasuk konteks historis di tempat terjadinya suatu perubahan sosial tersebut. Sedangkan dalam dimensi waktu dalam studi perubahan sosial merujuk pada konteks masa lalu (*past*) dan sekarang (*present*).<sup>16</sup> Konteks masa lampau dalam perubahan sosial menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam studi perubahan sosial karena sebagai pembanding antara kondisi masa lampau dan sekarang.

Menurut Prof. Selo Soemardjan perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilakuannya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya berbicara tentang kemajuan yang terjadi di masyarakat saja melainkan juga kemunduran terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Perubahan sosial bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja, terdapat faktor internal maupun eksternal dari

---

<sup>15</sup> Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 431-432.

<sup>16</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 3.

masyarakat itu sendiri yang menyebabkan perubahan sosial tersebut terjadi.<sup>17</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat diantaranya adalah yang pertama faktor internal, meliputi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, dan terjadi pertentangan dalam masyarakat. Kemudian faktor eksternal meliputi terjadinya pemberontakan atau revolusi, peperangan, adanya pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain, dan adanya bencana alam atau kondisi lingkungan fisik yang memaksa masyarakat meninggalkan tanah permukimannya.<sup>18</sup>

Hans Dieter Ever (1980) seorang guru besar Sosiologi Universitas Bielefeld Jerman berhasil merekonstruksi berbagai temuan empiris di Asia Tenggara tentang konsep perubahan sosial. Hans menemukan lima konsep utama tentang teori dasar dinamika perubahan sosial, salah satunya Teori Industrialisasi, Modernisasi, dan Pembangunan dari S.J. Chen (1980). Teori tersebut menganggap bahwa perubahan sosial yang berbentuk perubahan nilai-nilai dan perilaku produksi masyarakat di Asia Tenggara ditentukan oleh modernisasi, industrialisasi, dan pembangunan. Selain itu, terdapat perubahan perilaku kerja dan relasi seperti perubahan perilaku dalam kehidupan masyarakat, sistem relasi kekeluargaan, dan perubahan nilai serta kebudayaan akibat nilai-nilai tandingan dan budaya populer yang ada.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 16.

<sup>18</sup> Nurul Istiqomah, *Skripsi: "Dampak relokasi permukiman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Rumah Susun Jatinegara Barat"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), Diterbitkan, hlm. 22.

<sup>19</sup> Agus Salim, *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Jogja, 2002), hlm.134.

Teori tersebut sejalan dengan pendapat Moore (1967) bahwa perubahan sosial merupakan perubahan penting dari struktur sosial, yaitu perihal pola-pola perilaku dan interaksi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Moore juga memasukkan berbagai ekspresi mengenai struktur sosial, seperti norma-norma, nilai-nilai, dan fenomena kultural ke dalam definisi perubahan sosial tersebut sehingga definisi perubahan sosial menurut Moore sangat luas karena mencakup berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan sosial dapat menembus berbagai tingkat kehidupan sosial sehingga menjadi fenomena yang cukup kompleks dan seluruh aspek kehidupan manusia akan selalu berubah tiap waktu. Teori S.J. Chen dan pendapat dari para ahli seperti Moore dan Lauer tersebut juga didukung/saling berkaitan dengan pemikiran Himes dan Moore (1968) tentang dimensi perubahan sosial.

### **Dimensi Perubahan Sosial Menurut Himes dan Moore (1968)**

Penelitian ini akan berfokus dalam melihat dan menganalisis perubahan sosial berdasarkan teori dari Himes dan Moore (dalam Martono, 2011:5), yang mana perubahan sosial dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu:

#### **1. Dimensi Struktural**

Dalam dimensi struktural, perubahan sosial mengacu pada bentuk struktur masyarakat (yang dibentuk oleh dua unsur, status dan peranan) yang berhubungan dengan adanya perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan struktur kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial di dalam masyarakat tersebut.

#### **Peran**

Dalam bermasyarakat, setiap individu akan menduduki suatu posisi tertentu dan memiliki perannya masing-masing. Peran menurut Soekanto (dalam Brigitte et al., 2017) adalah saat seseorang menjalankan hak dan kewajibannya maka ia dapat dikatakan sedang melakukan suatu peranan yang dapat dilakukan secara perorangan dan badan atau lembaga yang menduduki suatu tempat.

### **Kelas Sosial**

Menurut Karl Marx (dalam Wright, 2003) berbagi ide dengan Weber, kelas sosial harus didefinisikan dalam hal hubungan sosial yang menghubungkan orang dengan sumber daya pusat yang relevan dengan produksi secara ekonomi. Marx juga melihat bahwa hubungan ini berdampak secara sistematis pada kesejahteraan material seseorang. Disamping itu, menurut Wright (2003), kelas merupakan berbagai kategori dan atribut-atribut sosial yang secara subjektif dapat dilihat menonjol dan digunakan oleh orang-orang untuk menilai dan mengurutkan kategori-kategori tersebut dalam suatu sistem stratifikasi ekonomi (gaya hidup, pekerjaan, dan tingkat pendapatan).

### **Lembaga Sosial**

Menurut Koentjaraningrat (dalam Soekanto, 2014) lembaga sosial merupakan suatu wadah yang didalamnya mengandung unsur-unsur pengatur perilaku masyarakat.

## **2. Dimensi Kultural**

Kultur merupakan kebudayaan. Adanya perubahan sosial dalam

masyarakat akan berpengaruh terhadap sikap-sikap, nilai-nilai, dan pola perilaku kelompok masyarakat, hal inilah yang kemudian akan berpengaruh terhadap kebudayaan mereka. Perubahan sosial dalam dimensi kultural merupakan suatu perubahan yang terjadi pada nilai-nilai dalam masyarakat menyangkut hal abstrak yang dimiliki seperti keyakinan, pemikiran pandangan, dan juga perilaku dari masyarakat.

Terdapat beberapa jenis perubahan budaya dalam masyarakat yang senantiasa terjadi, yaitu:

**a. Inovasi Kebudayaan**

Inovasi kebudayaan merupakan komponen internal yang memunculkan perubahan sosial dalam suatu masyarakat, biasanya memunculkan pembaharuan dari kultur lama, bahkan muncul kultur baru yang sebelumnya belum pernah ada.

**b. Difusi**

Difusi sebagai komponen eksternal yang berhubungan dengan kebudayaan di sini memiliki arti bahwa akan sangat mungkin terjadi pembauran atau penyebaran kultur yang mampu menggerakkan terjadinya perubahan sosial.

**c. Integrasi**

Integrasi di sini memiliki arti bahwa dalam perubahan sosial yang kaitannya dengan dimensi kultural, integrasi merupakan wujud perubahan budaya yang “relatif lebih halus”.

**3. Dimensi Interaksional**

Interaksi sosial merupakan tombak dari suatu kehidupan sosial. Hal ini disebabkan karena kehidupan sosial tanpa adanya interaksi sosial antar manusia maka tidak akan tercipta kehidupan bersama (Kimball Young dan Raymond W. Mack dalam Soekanto, 2012:54). Menurut Bonner dalam Razak (2008:57) interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih sehingga tindakan yang dilakukan oleh satu individu dapat memengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tindakan individu yang lain, begitupun sebaliknya.

Manusia sebagai makhluk sosial butuh menjalin interaksi antar sesama melalui kerja sama dalam mencapai suatu tujuan bahkan hingga melalui pertikaian. Agar suatu interaksi sosial dapat berjalan dengan teratur, George Herbert Mead dalam Narwoko (2007:20) berpendapat bahwa untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sebuah kemampuan untuk bertindak berdasarkan konteks sosialnya dan kemampuan untuk menilai perilaku kita sendiri dari sudut pandang orang lain secara objektif.

Terdapat dua syarat terjadinya interaksi sosial yang ditinjau secara teoritis, yaitu adanya kontak sosial sebagai tahap paling awal dalam menjalin hubungan sosial dan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi yang mencerminkan bahwa interaksi sosial sudah terjalin. (Narwoko, 2007:10).

Menurut Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 2007) terdapat dua bentuk interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Berikut ini merupakan penjelasannya.

### **a. Interaksi Sosial Asosiatif**

#### 1) Kerja sama

Kerja sama dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan bersama antar orang atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Berbagai jenis atau bentuk kerjasama diantaranya adalah gotong royong, bargaining, kooptasi, koalisi, dan *join venture*.

#### 2) Akomodasi

Akomodasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang mengarah pada upaya-upaya manusia untuk meredakan pertentangan guna mewujudkan keseimbangan. Dengan adanya akomodasi, individu atau kelompok dapat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

#### 3) Asimilasi

Asimilasi dapat didefinisikan sebagai upaya antar individu maupun kelompok untuk mengurangi perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Terjadinya asimilasi ditandai dengan adanya perkembangan sikap yang sama dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

### **b. Interaksi Sosial Disosiatif**

#### 1) Persaingan



Persaingan didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang untuk mendapatkan keuntungan atau kemenangan dengan kompetitif antar individu maupun kelompok tanpa kekerasan maupun ancaman kepada lawan.

## 2) Kontroversi

Kontroversi didefinisikan sebagai bentuk proses sosial antara persaingan dan konflik. Adanya suatu kontroversi ditandai dengan munculnya sikap tidak suka kepada individu atau kelompok secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

## 3) Konflik

Konflik didefinisikan sebagai suatu proses sosial antar individu maupun kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan cara menentang pihak lawan dengan ancaman dan kekerasan. Konflik dapat muncul karena terdapat perbedaan kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan yang menghambat interaksi sosial mereka yang bertikai.

### **1.6.2. Sikap Politik**

#### **A. Sikap**

Manusia sebagai makhluk sosial setiap waktu pasti akan berinteraksi dan beraktivitas bersama orang lain di kehidupannya. Aktivitas dan interaksi yang mereka lakukan selalu mengandung sikap yang secara langsung

muncul dari dalam diri manusia melalui aktivitas dan interaksi mereka kepada kehidupannya. Jika dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan akal yang jauh lebih unggul. Salah satunya adalah bahwa manusia memiliki kemampuan tersendiri dalam menentukan bagaimana harus bersikap kepada lingkungannya. Sikap sendiri didefinisikan sebagai proses sosialisasi yang menentukan bagaimana manusia akan bereaksi terhadap suatu hal sesuai dengan rangsang yang diterimanya.<sup>20</sup> Karena sikap berhubungan erat dengan proses interaksi atau komunikasi antar manusia, Hovlan, Janis, dan Kelley berpendapat bahwa terdapat tiga variabel penting dalam menelaah sikap, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Pesan dalam proses komunikasi antar manusia sangat berpotensi mengalami penerimaan maupun penolakan. Untuk menentukan keberhasilan proses komunikasi, perlu adanya perhatian dari komunikan yang kemudian disusul dengan tahap komunikan telah mengerti. Kemampuan komunikan tersebut akan mempengaruhi proses berikutnya tentang apakah ia akan mengolah dan menerimanya, yang mana hal ini mempengaruhi terjadinya kesediaan manusia untuk mengubah sikap.<sup>21</sup>

Sikap juga berhubungan erat dengan perilaku manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat W.J. Thomas yang mengatakan bahwa sikap merupakan kesadaran alamiah dari individu dalam menentukan perbuatan

---

<sup>20</sup> Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 9.

<sup>21</sup> Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 22.

atau tingkah laku dalam aktivitas sosial.<sup>22</sup> Definisi serupa juga dikemukakan bahwa sikap merupakan kecenderungan berpikir, bertindak, memandang, dan merasa dalam menghadapi suatu objek tertentu yang mengandung aspek evaluatif (mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan) dan merupakan hasil dari proses belajar selama hidup, bukan bawaan sejak lahir.<sup>23</sup> Hal ini menjadi penyebab bahwa sikap sangat fleksibel karena dapat diperteguh maupun diubah.

Munculnya sikap manusia dari dalam dirinya tidak terjadi begitu saja. Suatu sikap dapat muncul setelah manusia mengetahui suatu objek secara langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk respon manusia terhadap objek atau situasi yang berkaitan dengannya. Seorang individu selalu mengetahui yang terbaik bagi dirinya, begitu pun cara mereka dalam merespon sesuatu melalui sikapnya. Jika objek tersebut dinilai positif, individu akan mendukung atau memihak, begitu juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Berkowitz bahwa sikap individu terhadap suatu objek merupakan bentuk perasaan mendukung maupun perasaan tidak mendukung pada objek tersebut.

#### **a) Pembentukan dan Perubahan Sikap**

Sikap yang keluar dari dalam diri individu sebagai bentuk respon terhadap suatu hal yang diketahui atau dialaminya tidak terjadi begitu saja. Dalam bersikap, seorang individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor

---

<sup>22</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 149.

<sup>23</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 52.

dari dalam dan dari luar dirinya yaitu pengalaman pribadi, emosi dalam diri individu, kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan agama, institusi, dan orang lain yang dianggap penting melalui hubungan antar individu, kelompok, dan melalui berbagai bentuk sarana komunikasi lainnya seperti surat kabar, poster, televisi, media sosial, radio, dan sebagainya.<sup>24</sup> Munculnya sikap ini kemudian akan terus mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, agama, hingga sikap politik.

#### **b) Fungsi Sikap**

Sebagai suatu hal yang muncul dari dalam diri manusia saat menjalani dinamika kehidupan, sikap seseorang memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut yang pertama adalah bahwa sikap merupakan suatu hal yang bersifat komunikatif yang mampu menjadi milik bersama (individu atau kelompok yang saling berhubungan). Kemudian, sikap memiliki fungsi sebagai alat yang mengatur tingkah laku seseorang dan dimiliki secara spontan terutama dalam merespon suatu objek. Selain itu, sikap dapat menjadi alat pengukur pengalaman seseorang dari internal maupun eksternal dirinya. Fungsi sikap yang terakhir adalah bahwa sikap dapat berfungsi sebagai pernyataan kepribadian yang mampu mencerminkan kepribadian seseorang dalam hidupnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Anwar Syarifuddin, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 30.

<sup>25</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 165.

## B. Politik

Cara pandang maupun persepsi masyarakat secara umum di Indonesia terutama bagi masyarakat awam terhadap “politik” dapat dikatakan negatif. Politik dinilai sebagai suatu hal yang kotor dan sewenang-wenang bagi masyarakat awam. Hal ini disebabkan karena praktik para pejabat negara yang memainkan peran politik di pemerintahan yang dilakukan dengan cara yang melanggar hukum maupun menyalahi definisi politik yang sesungguhnya. Padahal sesungguhnya politik bukanlah suatu hal yang buruk seperti persepsi tersebut. Menurut teori klasik Aristoteles, politik didefinisikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh warga negara demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Jika dikaitkan dengan negara (*state*), politik berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), kebijakan publik (*public policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).<sup>26</sup>

Memang persepsi masyarakat awam terhadap politik tidak sepenuhnya salah. Praktik politik yang ada meskipun tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, namun juga akan selalu berpotensi melahirkan konflik. Hal ini sejalan dengan definisi politik menurut Andrew Heywood bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen, peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari

---

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasarr-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 14.

gejala konflik dan kerja sama.<sup>27</sup> Dari berbagai definisi tersebut, politik pada dasarnya dapat diartikan sebagai upaya untuk menentukan seperangkat aturan yang mampu diterima dan dijalankan oleh warga negara sebagai upaya penyelesaian konflik dan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik.

### **C. Teori Sikap Politik**

Sikap dan politik sebagai dua hal yang berbeda dapat membentuk kesatuan yang juga lahir dari dalam diri manusia. Dalam bermasyarakat, seorang individu akan merespon suatu objek yang ada melalui sikapnya. Sikap-sikap yang ada tentu didasari dengan objek atau fenomena yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek politik yang kemudian melahirkan sikap politik individu dalam masyarakat. Sikap politik merupakan bentuk kesiapan untuk merespon objek tertentu yang bersifat politik yang merupakan hasil penghayatan terhadap objek tersebut (Sastroatmodjo, 1995). Sikap politik yang muncul dari dalam diri individu atau manusia dalam jumlah yang lebih banyak yang kemudian disebut dengan masyarakat akan mempengaruhi perilaku politik yang akan muncul.

Rusadi Kantaprawira (1983) menyatakan bahwa perilaku politik merupakan salah satu telaah tentang tindakan manusia dalam situasi politik. Situasi politik yang dimaksud ini mencakup berbagai macam permasalahan dan respon-respon emosional berupa dukungan maupun apati kepada pemerintah, serta respon terhadap hukum dan kebijaksanaan yang berkait

---

<sup>27</sup> Ibid. hlm. 16.

dengan kepentingan mereka sebagai masyarakat. Akan tetapi, sikap politik tersebut dinilai dapat menetap maupun dapat berubah sewaktu-waktu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor penyebab berubahnya sikap politik seorang individu tentu dapat dipengaruhi oleh objek yang ada seperti ideologi, budaya, kebijakan maupun program, sikap dan peran pemerintah, hingga dinamika politik dalam negaranya.

Pada intinya sikap atau perilaku politik dapat diartikan sebagai respon individu atau masyarakat terkait dengan situasi atau dinamika kehidupan yang menyangkut aspek politik yang diungkapkan dalam berbagai bentuk, baik positif maupun negatif dan dapat berubah sewaktu-waktu akibat berbagai faktor yang ada. Reaksi dalam berbagai bentuk ini misalnya ada yang merespon dengan menerima apa adanya, merespon dengan penolakan melalui unjuk rasa, memprotes secara halus, juga diam tanpa bereaksi apa-apa. Sudijono berpendapat bahwa diam juga termasuk sikap politik. Hal ini disebabkan karena dengan diam bukan berarti individu atau masyarakat yang bersangkutan tidak memiliki penghayatan terhadap objek tersebut dan dapat diartikan dengan sikap setuju, netral, maupun menolak namun merasa tidak berdaya untuk menentukan pilihan.

### **Komponen Sikap Menurut Gordon W. Alport (1954)**

Penelitian ini akan berfokus dalam melihat dan menganalisis perubahan sikap berdasarkan teori dari G. W. Alport yang mana sikap baru yang terbentuk, dalam

hal ini terbentuknya perubahan sikap politik masyarakat yang dapat dilihat dari beberapa komponen<sup>28</sup>, yaitu:

### **1. Komponen Kognitif**

Dalam komponen kognitif, sikap ini berisi tentang kepercayaan, ide, maupun konsep seseorang terhadap objek sikap. Objek sikap dalam hal ini adalah peran Pemerintah Kota Semarang terkait dengan kesejahteraan masyarakat Kampung Nelayan Tambakrejo sebelum dan sesudah direlokasi. Komponen kognitif dipengaruhi oleh pengalaman, pengamatan, dan informasi yang diperoleh masyarakat tentang objek sikap. Berdasarkan hal tersebut kemudian terbentuk suatu ide atau gagasan yang disusul dengan terbentuknya sikap yang menyangkut kepercayaan masyarakat kepada objek sikap. Kepercayaan yang terbentuk akan menjadi dasar pengetahuan masyarakat tentang apa yang menjadi harapan dan apa yang bukan menjadi harapan masyarakat dari objek sikap.

### **2. Komponen Afektif**

Dalam komponen afektif, sikap yang muncul berhubungan dengan perasaan dan emosi seseorang terhadap objek sikap. Komponen ini dapat menimbulkan perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, maupun puas atau tidak puas terhadap objek sikap yang ada yang dipengaruhi oleh kognisi individu.

### **3. Komponen Konatif**

---

<sup>28</sup> Anwar Syaifuddin, op.cit., hlm. 18.



Dalam komponen Konatif, sikap yang muncul berhubungan dengan predisposisi atau kecenderungan individu untuk bertindak berkenaan dengan objek sikap yang dihadapinya. Suatu tindakan akan muncul berangkat dari kepercayaan dan perasaan individu terhadap objek sikap yang dihadapi. Komponen ini meliputi bentuk perilaku yang bukan hanya mampu dilihat secara langsung tetapi juga mengikuti bentuk perilaku yang berbentuk perkataan yang diucapkan oleh individu.<sup>29</sup>

### **Dampak Perubahan Sosial dan Politik**

Menurut Martono (2012) perubahan sosial senantiasa dapat mengandung dampak positif dan negatif. Masyarakat dapat merasakan dampak dari perubahan sosial dan politik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pernyataan tersebut, meskipun perubahan sosial dan politik diharapkan mampu menghantarkan ke arah yang lebih baik, namun tak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial dan politik juga bisa mengarah kepada dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dampak perubahan seringkali dihadapkan pada sistem nilai, norma, dan berbagai gagasan yang didukung oleh media-media komunikasi yang mampu mengubah sistem sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa modernisasi dan perubahan sosial merupakan dua hal yang saling berhubungan karena modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang dapat ditinjau dari dimensi struktural, kultural, dan interaksional dalam masyarakat. Kemudian, dalam suatu kehidupan bermasyarakat, selain aspek

---

<sup>29</sup> Azwar Syaifuddin, op.cit., hlm. 17.

sosial, masyarakat juga akan dihadapan oleh aspek politik yang lahir dari berbagai hal yang berkaitan dengan dimensi politik, termasuk peran dan sikap pemerintah maupun perumusan kebijakan, hingga praktek demokrasi. Perubahan sosial dan politik kemudian menjadi bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat yang akan memberikan berbagai dampak positif maupun negatif bagi kehidupan.

## **1.7. Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1. Definisi Konsep**

Adapun definisi konseptual yang digunakan, yaitu:

#### **1. Modernisasi**

Konsep modernisasi sebagai salah satu bagian dari teori pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari tradisional menjadi modern atau ke arah yang lebih maju dan meningkat dalam berbagai aspek kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya segala aspek kehidupan (sosial, ekonomi, budaya, politik) dalam masyarakat akan terlibat dalam proses modernisasi, meskipun arah dan kecepatan perubahannya berbeda-beda tiap masyarakat dan cenderung bersifat evolusioner.

#### **2. Perubahan Sosial**

Konsep Perubahan sosial sebagai bagian perubahan dari salah satu aspek kehidupan masyarakat (aspek sosial) merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang dapat ditinjau dari dimensi struktural, kultural, dan interaksional dalam masyarakat. Perubahan sosial meskipun memiliki tujuan ke arah yang lebih baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada realitasnya juga dapat memberikan

dampak negatif untuk masyarakat.

### 3. Perubahan Sikap Politik

Konsep perubahan sikap politik sebagaimana perubahan sosial juga merupakan salah satu bagian dari aspek kehidupan bermasyarakat (aspek politik). Perubahan sikap politik ini merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai bagian yang cakupannya lebih sempit dari aspek perubahan politik secara luas yang mana perubahan sikap ini dapat ditinjau dari tiga komponen sikap, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Perubahan sikap politik ini akan memberikan dampak positif maupun negatif khususnya dalam aspek politik dalam kehidupan sehari-hari.

#### **1.7.2. Definisi Operasional**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masyarakat pasca relokasi di Kampung Nelayan Tambakarejo Semarang. Dalam hal ini, operasional yang digunakan penulis merujuk pada dua teori, diantaranya adalah:

A. Teori Himes dan Moore yang menggunakan tiga dimensi untuk melihat perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu:

##### 1. Dimensi Struktural

- Perubahan peran
- Perubahan kelas sosial
- Perubahan lembaga sosial

##### 2. Dimensi Kultural

- Perubahan budaya (inovasi, difusi, integrasi)

### 3. Dimensi Interaksional

- Interaksi asosiatif (kerjasama, akomodasi, asimilasi)
- Interaksi disosiatif (persaingan, kontroversi, konflik)

B. Teori Gordon W. Allport (1954) yang menggunakan tiga komponen sikap dalam menganalisis munculnya sikap baru atau perubahan sikap. Pada penelitian ini khususnya perubahan sikap politik masyarakat terkait peran Pemerintah Kota Semarang dalam hal kesejahteraan masyarakat Kampung Nelayan Tambakrejo pasca relokasi. Komponen sikap tersebut yaitu:

#### 1. Komponen Kognitif

Komponen kognitif menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap objek sikap.

#### 2. Komponen Afektif

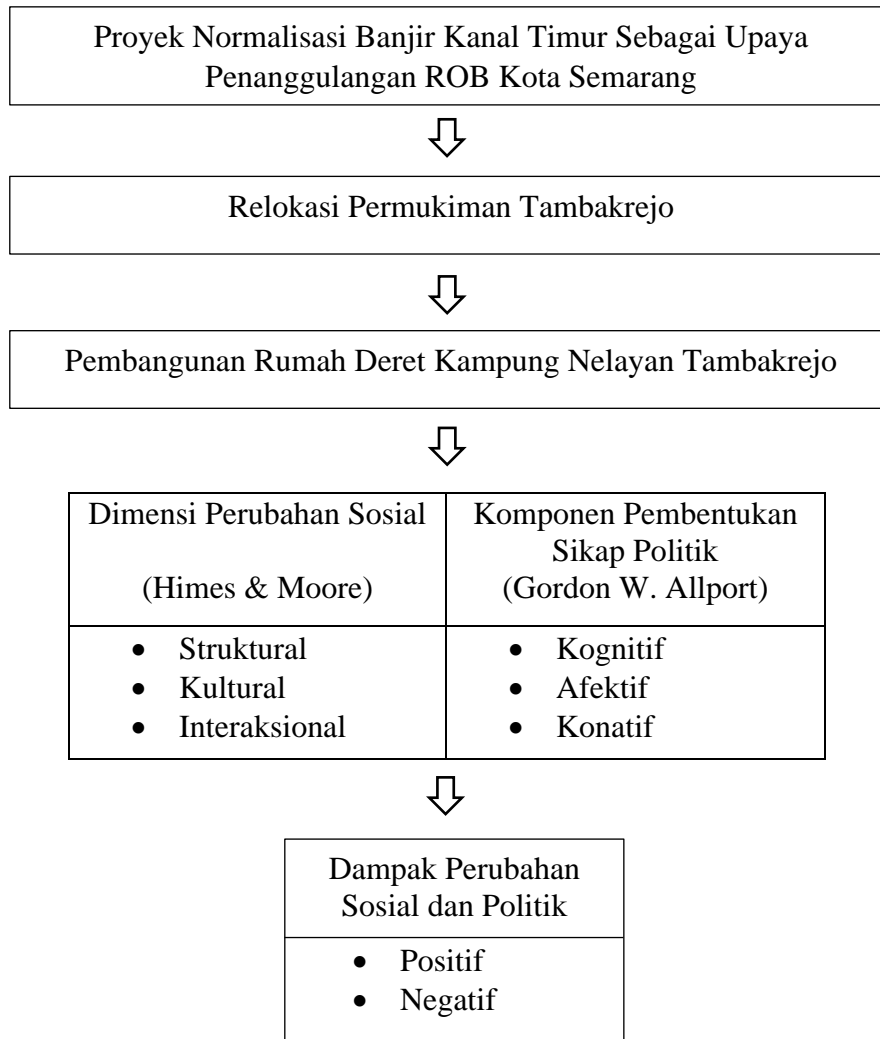
Komponen afektif menyangkut perasaan suka / tidak suka maupun puas / tidak puas dari masyarakat terhadap objek sikap.

#### 3. Komponen Konatif

Komponen konatif menyangkut tindakan atau perilaku masyarakat terhadap objek sikap.

Ketiga dimensi dan komponen tersebut nantinya juga akan digunakan untuk menganalisis dampak positif dan negatif yang muncul akibat dari adanya perubahan sosial dan politik dalam masyarakat Kampung Nelayan pasca direlokasi terhadap kehidupan sehari-hari dalam penelitian ini

## 1.8. Kerangka Berpikir



## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang hasilnya bersifat deskriptif berdasarkan sumber informasi yang berasal dari informan penelitian maupun perilaku dari sasaran penelitian dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Penelitian kualitatif menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara komprehensif atau belum diukur, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan situasi yang membentuk penyelidikan, sarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.<sup>30</sup>

### **1.9.2. Objek Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Deret RT 06 RW 16 Kampung Nelayan Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah karena tempat tersebut merupakan tempat relokasi yang merupakan sasaran penelitian penulis.

### **1.9.3. Subjek Penelitian**

Pemilihan sampel sebagai subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan maksud untuk menemukan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan memilih orang-orang yang dianggap memiliki

---

<sup>30</sup> Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

banyak pengetahuan dan informasi tentang apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan mempermudah peneliti dalam menjelajahi objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013: 218-219). Sampel-sampel yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian atau informan oleh penulis untuk mendukung penelitian adalah Rohmadi (Ketua RT 06 Kampung Nelayan Tambakrejo), Marzuki (Anggota KUB Armada Laut), Syafi' (Ketua KUB Armada Laut), Agung (Anggota Karang Taruna Tambakrejo), Zuli Abshor (Anggota KUB Armada Laut), Dhil Ula (Ibu Rumah Tangga), pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kota Semarang, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta pihak Kelurahan Tanjung Mas.

#### **1.9.4. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka.<sup>31</sup> Data tersebut diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, vidiotape, dokumen pribadi, dan memo. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi pasca relokasi di

---

<sup>31</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Hlm.4.

Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang. Pendekatan kualitatif ini juga bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masyarakat pasca relokasi dengan menyajikannya secara deskriptif.

#### **1.9.5. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber data primer dari warga asli Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang sebagai penghuni Kampung Deret hasil relokasi dengan teknik wawancara, dimana peneliti akan mengumpulkan sasaran penelitian sebagai informan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik lisan maupun tertulis.

#### **1.9.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data pendukung penelitian yang dibutuhkan. Tujuan dari adanya teknik pengumpulan data adalah untuk membantu penulis dalam memperoleh data-data yang otentik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data, yaitu:

##### **1. Observasi**

Menurut Sugiyono (2012:145) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam melakukan observasi, peneliti mendatangi lokasi penelitian dan melakukan pengamatan serta pencatatan terkait fenomena yang diteliti.



## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapandengan tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai sebagai narasumber atau pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperkuat apa yang telah didapat dari observasi secara langsung. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth iterview*) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari sasaran penelitian sebagai informan melalui daftar pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang lengkap dan valid.

### **1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan proses yang sistematis dalam pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan sumber data lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data-data yang terkumpul dan untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan penemuan peneliti kepada orang lain. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif dari Milles dan Huberman yang menyebutkan bahwa terdapat tiga proses yang berlangsung dalam analisis data kualitatif, yaitu:

#### a. Reduksi Data

Ini merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber data yang berasal dari dokumen catatan lapangan, arsip. Dalam

reduksi data juga terdapat proses mempertegas, mempersingkat, dan membuang yang sekiranya tidak perlu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses merakit dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk matrik, gambar, skema, jaringan kerja, dan tabel.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Ini merupakan proses penarikan kesimpulan tahap akhir setelah pengumpulan data berakhir, mengingat kesimpulan awal belum begitu kuat (Sugiyono, 2010:246).